



Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Sarana Internalisasi Nilai Pancasila

Millaty Azka^{1*}, Nuroh Nihayatuz Ziyen², Ranaditya Maulana³, Artika Arleawati⁴

¹⁻⁴Fakultas Ilmu Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

*Penulis korespondensi: millaaazka0707@gmail.com¹

Abstract. Civic Education (PKn) has a strategic role as the main means in internalizing the values of Pancasila to students. Through PKn, the process of forming the character and personality of citizens can be carried out systematically, sustainably, and contextually, based on the values of divinity, humanity, unity, democracy, and justice. The internalization of these values is not only through mastery of concepts, but also through habituation of attitudes and behaviors in daily life. An interactive, reflective, and social project-based approach to learning allows learners to actively develop moral awareness, social responsibility, and a sense of nationalism. PKn functions as a character education instrument that not only forms civic knowledge, but also builds a strong national identity and a tolerant spirit. In the context of globalization and the challenges of the digital era, civil society is an important foundation in equipping the young generation to be able to be critical, adaptive, and still uphold national values. Therefore, PKn is not just a formal subject, but a strategic vehicle in forming a generation with Pancasila character who is ready to contribute positively to the life of society, nation, and state. This research emphasizes the urgency of PKn revitalization as a transformative and contextual value education.

Keywords: Civic Education; Internalization; National Character; National Identity; Pancasila Values

Abstrak. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran strategis sebagai sarana utama dalam menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik. Melalui PKn, proses pembentukan karakter dan kepribadian warga negara dapat dilakukan secara sistematis, berkelanjutan, dan kontekstual, berlandaskan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Internalisasi nilai-nilai tersebut tidak hanya melalui penguasaan konsep, tetapi juga melalui pembiasaan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan pembelajaran yang interaktif, reflektif, dan berbasis proyek sosial memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kesadaran moral, tanggung jawab sosial, dan semangat kebangsaan secara aktif. PKn berfungsi sebagai instrumen pendidikan karakter yang tidak hanya membentuk pengetahuan kewarganegaraan, tetapi juga membangun identitas kebangsaan yang kuat dan berjiwa toleran. Dalam konteks globalisasi dan tantangan era digital, PKn menjadi fondasi penting dalam membekali generasi muda agar mampu bersikap kritis, adaptif, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Oleh karena itu, PKn bukan sekadar mata pelajaran formal, melainkan wahana strategis dalam membentuk generasi berkarakter Pancasila yang siap berkontribusi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penelitian ini menegaskan urgensi revitalisasi PKn sebagai pendidikan nilai yang transformatif dan kontekstual.

Kata Kunci: Identitas Nasional; Internalisasi; Karakter Bangsa; Nilai Pancasila; Pendidikan Kewarganegaraan

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) di Indonesia memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan identitas kebangsaan siswa yang berbeda-beda. Melalui PKN, siswa diajarkan tentang berbagai hak dan kewajiban sebagai warga negara serta nilai-nilai dasar yang mendasari kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara. Pendidikan Kewarganegaraan adalah sarana yang tepat untuk menginternalisasikan nilai-nilai karakter bangsa. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) merupakan subjek pembelajaran yang mengemban misi untuk membentuk kepribadian bangsa, yakni sebagai upaya sadar dalam “nation and character building” (panglila, 2017). Membangun karakter seseorang dan memahami posisinya sebagai warga negara membutuhkan pendidikan kewarganegaraan (Lutfi, 2024). Cita-cita Islam,

seperti pendidikan kewarganegaraan, dianggap penting untuk mengembangkan moral dan karakter siswa yang kuat di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Integrasi ini menciptakan warga negara yang bermoral dengan mengembangkan prinsip-prinsip etika dan agama Islam di samping mendidik hak dan tanggung jawab warga negara (mustain, 2025).

Dalam konteks ini, peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) bagi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara yang sangat strategis. Suatu negara demokratis pada akhirnya harus bersandar pada pengetahuan, keterampilan, dan kebajikan dari warga negaranya dan orang-orang yang mereka pilih untuk menduduki jabatan publik. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga negara yang sangat baik (to be good and smart citizens) yang memiliki komitmen yang kuat dalam mempertahankan keberagaman di Indonesia dan mempertahankan integritas nasional. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat dan mencapai kompetensi kewarganegaraan. Selain itu, pendidikan ini juga merupakan hasil dari pengembangan keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan yang dapat disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Dengan kata lain, Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat identitas dan tanggung jawab kewarganegaraan individu dalam konteks masyarakat dan negara. Seiring dengan itu, pendidikan ini juga terus berkembang sesuai dengan dinamika zaman serta kebutuhan yang ada dalam menciptakan warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan terlibat aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Trisiana, 2020).

Kurikulum kewarganegaraan di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan karakter bangsa. Namun, globalisasi mempengaruhi cara pandang terhadap pendidikan ini dengan menghadirkan standar internasional, arus informasi yang deras, dan beragam ideologi yang mempengaruhi generasi muda. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana kurikulum kewarganegaraan beradaptasi dengan perubahan global dan dampaknya terhadap pembentukan karakter bangsa (Mustain, 2024).

Di tengah arus globalisasi yang semakin kuat, globalisasi bertanggung jawab atas penurunan nilai-nilai moral dan karakter, yang merupakan ancaman serius yang membutuhkan perhatian dari berbagai pihak. Konsep globalisasi merujuk pada proses penyatuan masyarakat secara global karena kemajuan teknologi dan komunikasi, yang memungkinkan interaksi yang lebih cepat antara wilayah-wilayah di seluruh dunia. Dengan demikian, globalisasi juga membawa pengaruh dari luar yang dapat masuk ke Indonesia (Budiarto, 2020). Tentu dalam menghadapi globalisasi ini penguatan identitas nasional menjadi semakin penting. Salah satu

cara untuk mencapai tujuan ini adalah dengan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam pembelajaran PKN. Kearifan lokal yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, norma, dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi, dapat menjadi sumber nilai yang kaya dan relevan untuk memperkuat karakter dan jati diri siswa (Thomy, 2024).

Namun, di tengah derasnya arus globalisasi, perkembangan teknologi, serta kemajuan sosial-budaya, muncul tantangan serius berupa menurunnya semangat nasionalisme, lunturnya nilai gotong royong, dan meningkatnya perilaku intoleran di kalangan generasi muda (Suprayogi, Rahmawati, Rafi'uddin, & Wiratomo, 2024). Kondisi ini menandakan bahwa nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya terinternalisasi dalam diri peserta didik. Oleh karena itu, PKN berfungsi sebagai sarana efektif untuk menanamkan dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila agar menjadi pedoman sikap dan perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari (Malaka, Sanusi, Ruslan, & Maimun, 2024).

Urgensi Penelitian

Urgensi penelitian ini terletak pada upaya penguatan kembali fungsi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana pembentukan karakter bangsa di tengah tantangan era digital. Selama ini, pembelajaran PKN sering kali terjebak pada pendekatan kognitif yang menekankan hafalan konsep-konsep kewarganegaraan tanpa menyentuh aspek internalisasi nilai. Akibatnya, pemahaman peserta didik terhadap Pancasila bersifat formalistik, belum sampai pada tataran penghayatan dan penerapan (Pangalila, 2017). Penelitian ini penting untuk mengkaji kembali bagaimana strategi pembelajaran PKN dapat berperan secara optimal sebagai sarana internalisasi nilai-nilai Pancasila yang mampu membentuk warga negara yang berkarakter Pancasila.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) sebagai sarana internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan karakter peserta didik, mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila yang relevan untuk diintegrasikan dalam proses pembelajaran PKN, serta menganalisis strategi dan model pembelajaran PKN yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana PKN berfungsi tidak hanya sebagai mata pelajaran kognitif, tetapi juga sebagai wahana pembentukan karakter yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi konkret bagi pengembangan model pembelajaran PKN yang mampu menumbuhkan sikap religius, humanis, nasionalis, demokratis, dan berkeadilan sosial pada diri peserta didik sesuai dengan semangat Pancasila.

Kontribusi Penelitian

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pembelajaran kewarganegaraan berbasis nilai dan karakter, khususnya dalam konteks pendidikan nasional Indonesia. Penelitian ini menegaskan kembali fungsi PKn sebagai instrumen pembentukan warga negara yang berkarakter Pancasila, yang memiliki kesadaran hukum, tanggung jawab sosial, dan komitmen terhadap keutuhan bangsa (Basamah & Ediyono, 2023). Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi guru dan pengambil kebijakan pendidikan untuk merancang strategi pembelajaran PKn yang berorientasi pada internalisasi nilai, bukan hanya pada transfer pengetahuan. Dengan demikian, PKn dapat berfungsi sebagai media utama dalam memperkuat karakter dan identitas kebangsaan peserta didik di era modern.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Internalisasi nilai adalah proses di mana nilai-nilai abstrak menjadi bagian dari sistem keyakinan dan perilaku individu sehingga termanifestasi dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Panglila menekankan bahwa PKn berperan krusial dalam meningkatkan *civic disposition* siswa (kesadaran kewargaan, komitmen pada keberagaman, integritas publik). Studi ini menyorot aspek kurikuler dan metode pembelajaran yang memengaruhi pembentukan sikap (Panglila, 2017). Studi ini memaparkan mekanisme integrasi setiap sila Pancasila ke dalam KD (kompetensi dasar) PKn dan praktik pembelajaran sekolah (kegiatan ekstrakurikuler, budaya sekolah). Mereka mendeskripsikan contoh strategi kurikulum-konsep dan menekankan pentingnya penguatan budaya sekolah untuk menjamin keberlanjutan internalisasi. Metode yang digunakan bersifat deskriptif-kualitatif dengan studi kasus beberapa sekolah (Malaka, Sanusi, Ruslan & Maimun, 2024).

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang sesuai adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan karena fokus penelitian adalah memahami proses, makna, dan pengalaman peserta didik, guru, serta lingkungan sekolah dalam menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan kewarganegaraan (Moleong, 2019). Peneliti berusaha mendeskripsikan secara mendalam fenomena sosial dan pendidikan tanpa manipulasi variabel. Deskriptif kualitatif bertujuan menggambarkan secara rinci bagaimana nilai-nilai Pancasila diinternalisasikan dalam pembelajaran PPKn. Jika penelitian dilakukan di satu sekolah atau lembaga pendidikan

tertentu, maka jenis studi kasus lebih tepat digunakan untuk menggali konteks secara mendalam (Creswell, 2014).

Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana internalisasi nilai Pancasila adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles dan Huberman, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap dinamika yang terjadi secara alami di lingkungan pendidikan, serta memahami nilai-nilai yang berkembang melalui interaksi sosial dan proses pembelajaran. Dalam konteks ini, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya dipandang sebagai mata pelajaran formal, tetapi juga sebagai wahana pembentukan karakter dan penguatan identitas kebangsaan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memainkan peran penting dalam menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila kepada peserta didik. Melalui PKn, siswa tidak hanya belajar konsep tentang kewarganegaraan, tetapi juga ditanamkan nilai moral yang terkandung dalam Pancasila. Proses ini membentuk karakter siswa agar memiliki kepribadian yang berlandaskan Pancasila, dengan nilai-nilai seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Keadilan. PKn berfungsi sebagai wadah untuk membangun karakter siswa melalui berbagai kegiatan dalam pembelajaran, seperti diskusi dan proyek sosial. Disini guru juga sangat berperan sebagai teladan moral yang menjadi panutan bagi siswa. Namun, tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi dapat melemahkan semangat nasionalisme di kalangan generasi muda seperti di zaman sekarang ini.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran fundamental dalam membentuk karakter bangsa Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Sebagai mata pelajaran yang tidak hanya bersifat kognitif tetapi juga normatif dan afektif, PKn berfungsi sebagai wahana strategis dalam menanamkan dan menginternalisasikan nilai-nilai moral, sosial, dan kebangsaan kepada peserta didik. Menurut Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, PKn merupakan instrumen pendidikan yang tidak hanya mentransfer pengetahuan mengenai hak dan kewajiban warga negara, melainkan juga sarana pembentukan kesadaran nilai melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila (Nasoha & Atqiya, 2024). Internalisasi ini menuntut keterlibatan seluruh aspek pendidikan—kurikulum, guru, dan lingkungan sosial—agar nilai-nilai luhur bangsa benar-benar tertanam dalam diri peserta didik.

Berdasarkan kajian terhadap pemikiran Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, diperoleh hasil bahwa pendidikan kewarganegaraan (PKn) berperan strategis sebagai sarana internalisasi nilai-nilai Pancasila pada peserta didik. Nasoha (2020) menegaskan bahwa pembelajaran PKn tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan tentang norma dan konstitusi, tetapi juga menjadi media internalisasi nilai-nilai dasar bangsa seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial.

Secara konseptual, proses internalisasi nilai diartikan sebagai upaya menanamkan nilai-nilai moral tertentu sehingga menjadi bagian dari sistem keyakinan dan kepribadian seseorang (Lickona, 1991). Dalam konteks PKn, internalisasi nilai Pancasila berarti membawa peserta didik dari sekadar memahami secara intelektual menuju penghayatan dan pengamalan dalam kehidupan nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran PKn di sekolah sering kali masih berorientasi pada aspek kognitif, yaitu penguasaan materi, belum menyentuh ranah afektif dan psikomotorik secara optimal (Nasoha, 2020). Sekolah yang berhasil menanamkan nilai-nilai Pancasila umumnya menerapkan metode partisipatif seperti diskusi, studi kasus, dan project-based learning (Hidayat, 2021). Pendekatan ini memungkinkan peserta didik memahami sekaligus mengamalkan nilai dalam kehidupan nyata.

Selain itu, integrasi antara nilai agama dan nilai Pancasila dinilai mampu memperkuat proses internalisasi, terutama di sekolah berbasis keagamaan. Nilai-nilai moral keagamaan yang dikaitkan dengan nilai-nilai kebangsaan membentuk pemahaman holistik terhadap karakter warga negara yang beriman dan berakhlak mulia (Wibowo, 2019). Namun demikian, Nasoha (2020) mengingatkan perlunya keseimbangan agar integrasi tersebut tidak mengaburkan perbedaan tujuan antara pendidikan agama dan PKn.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran penting sebagai sarana internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam diri peserta didik. Menurut Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga sistem etika bangsa yang menjadi pedoman moral dan perilaku warga negara (Nasoha & Atqiya, 2024). Nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial harus ditanamkan melalui proses pendidikan yang menyentuh seluruh aspek kepribadian manusia, bukan hanya pengetahuan.

Dalam pandangannya, Nasoha menekankan bahwa pembelajaran PKn sering kali masih terjebak dalam aspek kognitif saja, yaitu sebatas memahami isi sila-sila Pancasila tanpa benar-benar menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Padahal, tujuan utama PKn adalah membentuk karakter warga negara yang beriman, bermoral, dan bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara (Nasoha, 2024). Pandangan ini diperkuat oleh Samani dan

Hariyanto (2017) yang menjelaskan bahwa pendidikan karakter akan efektif apabila melibatkan tiga ranah utama, yakni kognitif (pengetahuan nilai), afektif (penghayatan nilai), dan psikomotorik (tindakan nyata). Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan yang berorientasi pada internalisasi nilai harus mengembangkan strategi pembelajaran yang melibatkan pengalaman langsung dan keteladanan. Kesenjangan antara pengetahuan dan tindakan ini menjadi tantangan utama dalam proses internalisasi nilai Pancasila di sekolah-sekolah.

Untuk mengatasi hal tersebut, Nasoha mengusulkan agar proses pembelajaran PKn dikembangkan dengan metode yang partisipatif, reflektif, dan kontekstual. Metode tersebut memungkinkan siswa belajar secara aktif dan mengalami langsung penerapan nilai-nilai Pancasila (Nasoha & Atqiya, 2025). Beberapa pendekatan yang disarankan meliputi kegiatan *service learning* atau pembelajaran berbasis pengabdian masyarakat, simulasi musyawarah di kelas, serta analisis kasus-kasus sosial yang terjadi di lingkungan sekitar siswa. Dengan demikian, siswa tidak hanya memahami nilai-nilai secara teoritis, tetapi juga menghayatinya dalam tindakan nyata sehari-hari.

Dalam konteks pembelajaran, strategi partisipatif dan reflektif menjadi pendekatan yang paling efektif dalam menanamkan nilai Pancasila. Nasoha & Atqiya (2025) mengemukakan bahwa guru berperan sebagai fasilitator yang menuntun siswa menemukan makna nilai dalam kehidupan mereka sendiri. Pembelajaran berbasis proyek sosial, kegiatan musyawarah kelas, dan studi kasus tentang isu-isu kebangsaan merupakan bentuk konkret dari pendekatan ini. Melalui pengalaman langsung, peserta didik dapat mengaitkan nilai-nilai seperti keadilan, gotong royong, dan musyawarah dengan realitas sosial, sehingga proses internalisasi nilai berlangsung secara alami dan mendalam.

Penelitian Basamah dan Ediyono (2024) menegaskan bahwa PKn berfungsi mentransformasikan nilai-nilai Pancasila dari konsep teoretis menjadi kebiasaan moral yang nyata. Mereka menemukan bahwa metode pembelajaran aktif dan reflektif lebih efektif dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan dibandingkan metode ceramah tradisional. Dengan melibatkan siswa dalam proses berpikir kritis dan diskusi kelompok, mereka tidak hanya memahami nilai tetapi juga belajar menerapkannya dalam konteks sosial. Proses ini sejalan dengan teori *experiential learning* yang dikembangkan oleh Kolb (1984), di mana pengalaman menjadi dasar pembentukan pengetahuan dan nilai moral.

Selain aspek pedagogis, Nasoha (2025) juga menekankan pentingnya integrasi antara nilai-nilai Pancasila dengan nilai-nilai keagamaan. Ia berpandangan bahwa nilai-nilai spiritual dalam ajaran agama, seperti keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial, merupakan

refleksi dari nilai-nilai Pancasila. Integrasi ini penting karena membangun kesadaran bahwa menjadi warga negara yang baik identik dengan menjadi pribadi yang beriman dan berakhlak mulia. Dengan demikian, PKn bukan hanya mendidik warga negara yang cerdas secara politik, tetapi juga berkarakter religius dan bermoral.

Selain integrasi nilai agama, dimensi budaya juga memegang peranan penting dalam internalisasi nilai Pancasila. Menurut Sastra Atmaja (2024), budaya lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan sopan santun merupakan bentuk konkret dari nilai-nilai Pancasila yang hidup di masyarakat. Mengaitkan pembelajaran PKn dengan konteks budaya lokal akan membantu peserta didik memahami bahwa nilai-nilai Pancasila bukanlah konsep abstrak, melainkan warisan budaya yang melekat pada kehidupan bangsa Indonesia. Nasoha (2024) juga menekankan bahwa internalisasi nilai akan berhasil apabila peserta didik melihat relevansi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam penelitian Malaka, Sanusi, dan Ruslan (2020), ditemukan bahwa pelaksanaan PKn di banyak sekolah masih menghadapi tantangan dalam hal pendekatan pembelajaran. Dominasi metode ceramah dan minimnya bahan ajar kontekstual menghambat proses internalisasi nilai. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kurikulum yang menempatkan pembentukan karakter sebagai kompetensi inti. Guru perlu diberikan pelatihan agar mampu mengembangkan kegiatan pembelajaran berbasis nilai yang kontekstual dan partisipatif. Tanpa perubahan struktural tersebut, internalisasi nilai Pancasila akan sulit diwujudkan secara nyata dalam perilaku peserta didik.

Model sekolah berbasis budaya (*school as culture*) juga menjadi pendekatan yang terbukti efektif dalam internalisasi nilai-nilai Pancasila. Studi *Internalization of Pancasila Values Based on School Culture* (2022) menunjukkan bahwa budaya sekolah yang mempraktikkan nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan rutin seperti upacara, program gotong royong, serta keteladanan guru mampu membentuk lingkungan moral yang kuat. Ketika nilai-nilai Pancasila diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari warga sekolah, maka internalisasi terjadi secara alami tanpa paksaan. Hal ini sesuai dengan konsep “pendidikan nilai melalui pembiasaan” yang dikemukakan oleh Thomas Lickona (1991).

Dalam diskursus ilmiah, sering muncul perdebatan antara internalisasi dan indoktrinasi nilai Pancasila. Kajian Problematika antara Internalisasi dan Indoktrinasi Nilai Pancasila dalam Pembelajaran PKn (2024) menegaskan bahwa internalisasi yang sejati harus bersifat reflektif dan kritis, bukan dogmatis. Pendidikan nilai yang efektif justru mendorong peserta didik untuk memahami rasionalitas etis di balik nilai-nilai Pancasila dan mengadopsinya secara sadar. Oleh karena itu, PKn perlu mengembangkan iklim pembelajaran yang terbuka terhadap dialog,

diskusi, dan perbedaan pendapat. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila akan tertanam melalui proses berpikir kritis, bukan sekadar penerimaan tanpa refleksi.

Dalam konteks pendidikan dasar, internalisasi nilai-nilai Pancasila perlu dimulai sejak usia dini. Hidayanto (2025) menegaskan bahwa pembiasaan sikap seperti menghormati perbedaan, bekerja sama, dan berbagi di tingkat pendidikan anak usia dini memiliki dampak jangka panjang terhadap pembentukan karakter kewarganegaraan. Oleh karena itu, PKn seharusnya tidak dipandang hanya sebagai mata pelajaran di jenjang sekolah menengah, tetapi sebagai proses pendidikan karakter yang berkesinambungan sejak masa kanak-kanak hingga perguruan tinggi.

Selain itu, Karimullah dan Suud Sarim (2025) menempatkan internalisasi nilai Pancasila dalam konteks pencegahan radikalisme dan penguatan toleransi sosial. Menurut mereka, pendidikan kewarganegaraan yang dikombinasikan dengan pendidikan hak asasi manusia (HAM) serta kegiatan interaksi lintas agama dan budaya dapat memperkuat nilai-nilai pluralisme dan empati sosial. Kolaborasi antara sekolah, masyarakat, dan lembaga pemerintah diperlukan untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tidak hanya diajarkan di ruang kelas, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sosial.

Lebih lanjut, Nasoha menilai bahwa nilai-nilai agama dan hak asasi manusia (HAM) dapat diintegrasikan dengan pembelajaran PKn tanpa mengurangi makna kebangsaan. Nilai-nilai universal dalam agama seperti keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial sangat sejalan dengan semangat Pancasila (Nasoha, 2025). Integrasi ini dapat memperkuat dimensi moral dan spiritual siswa, sehingga pembelajaran PKn tidak hanya berorientasi pada nasionalisme, tetapi juga kemanusiaan universal.

Selain integrasi nilai agama, Nasoha juga menyoroti pentingnya budaya lokal sebagai media internalisasi nilai-nilai Pancasila. Dalam artikelnya berjudul “Peran Pancasila sebagai Pedoman Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dalam Dinamika Sejarah dan Perkembangannya”, beliau menjelaskan bahwa budaya seperti gotong royong, musyawarah, dan solidaritas sosial merupakan wujud konkret dari sila-sila Pancasila yang telah hidup dalam masyarakat Indonesia sejak lama (Nasoha, 2024). Oleh karena itu, pembelajaran PKn yang berbasis budaya lokal akan membantu siswa memahami Pancasila dalam konteks sosial dan sejarah mereka sendiri.

Namun, dalam implementasinya, terdapat beberapa hambatan yang perlu diatasi. Nasoha (2024) mengidentifikasi bahwa metode pengajaran tradisional yang masih dominan, keterbatasan bahan ajar yang kontekstual, dan kurangnya pelatihan guru menjadi faktor utama yang menghambat keberhasilan internalisasi nilai Pancasila. Guru sering kali lebih fokus pada

penyampaian teori ketimbang mengembangkan kegiatan yang menanamkan nilai. Akibatnya, nilai Pancasila hanya dipahami secara hafalan, bukan menjadi kebiasaan hidup.

Nasoha juga menekankan pentingnya sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam membentuk lingkungan pendidikan yang kondusif terhadap nilai-nilai Pancasila. Menurutnya, pembentukan karakter tidak cukup dilakukan di sekolah saja, tetapi harus didukung oleh keluarga dan lingkungan sosial agar nilai yang diajarkan tidak bertentangan dengan kebiasaan sehari-hari siswa (Nasoha & Atqiya, 2025). Kolaborasi ini menciptakan ekosistem pendidikan karakter yang utuh dan berkesinambungan.

Dalam konteks kurikulum, Nasoha berpendapat bahwa PKN perlu dikembangkan agar lebih menekankan aspek nilai dan karakter. Kurikulum seharusnya mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kompetensi dasar dan indikator pembelajaran. Guru juga perlu menggunakan model penilaian autentik untuk menilai sikap dan perilaku siswa di luar aspek kognitif (Nasoha & Atqiya, 2024). Dengan demikian, pendidikan nilai tidak hanya menjadi wacana, tetapi menjadi tolok ukur utama keberhasilan pendidikan kewarganegaraan.

Keteladanan guru menjadi hal yang sangat ditekankan oleh Nasoha. Menurutnya, internalisasi nilai akan gagal apabila guru tidak menjadi teladan bagi siswa. Guru yang bersikap adil, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab akan menjadi model nyata bagi siswa dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila (Nasoha, 2025). Keteladanan ini jauh lebih kuat pengaruhnya dibandingkan pengajaran teoritis yang bersifat verbal.

Selanjutnya, Nasoha menawarkan beberapa strategi konkret agar internalisasi nilai-nilai Pancasila lebih efektif. Strategi tersebut antara lain dengan mengaitkan pembelajaran dengan isu-isu aktual seperti intoleransi dan korupsi, melakukan refleksi nilai setelah kegiatan belajar, menciptakan lingkungan sekolah yang berkarakter, serta melibatkan peran orang tua dan masyarakat dalam kegiatan pendidikan (Nasoha, 2025). Melalui strategi ini, pendidikan kewarganegaraan akan lebih bermakna dan relevan bagi kehidupan peserta didik.

Pemikiran Nasoha (2024) juga menyoroti peran penting guru sebagai teladan moral. Keteladanan guru merupakan faktor utama dalam keberhasilan pendidikan nilai, karena peserta didik cenderung meniru perilaku nyata daripada hanya menerima nasihat verbal. Guru yang berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila akan menjadi model moral bagi peserta didik. Hal ini memperkuat pandangan Lickona (1991) bahwa pendidikan karakter yang berhasil memerlukan lingkungan yang konsisten antara ajaran dan tindakan.

Selain peran guru, sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan internalisasi nilai Pancasila. Nasoha & Atqiya (2024) menegaskan bahwa nilai akan sulit tertanam jika hanya diajarkan di sekolah tetapi tidak diperkuat di rumah

dan lingkungan sosial. Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan nilai memerlukan kolaborasi lintas lembaga, di mana setiap pihak memiliki tanggung jawab moral untuk menegakkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Secara keseluruhan, Nasoha memandang internalisasi nilai sebagai proses multidimensional yang melibatkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ketiga aspek ini harus berjalan seimbang agar pembelajaran PKn benar-benar membentuk karakter siswa yang berjiwa Pancasila (Nasoha & Atqiya, 2024). Internalisasi nilai tidak terjadi secara instan, tetapi melalui proses panjang yang mencakup pengetahuan, penghayatan, pembiasaan, dan tindakan nyata dalam kehidupan sosial.

Dengan demikian, pemikiran Ahmad Muhammad Mustain Nasoha menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan sarana strategis dalam membangun karakter bangsa. PKn bukan hanya pelajaran formal di kelas, tetapi sebuah gerakan moral yang menanamkan nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara kepada generasi muda. Internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan kewarganegaraan merupakan proses multidimensional yang melibatkan aspek pengetahuan, moralitas, budaya, dan spiritualitas. PKn berfungsi bukan hanya untuk mencetak warga negara yang cerdas dan patuh hukum, tetapi juga membentuk pribadi yang berkarakter, religius, dan memiliki tanggung jawab sosial. Melalui strategi pembelajaran reflektif, kontekstual, dan berbasis keteladanan, nilai-nilai Pancasila dapat dihidupkan kembali dalam kesadaran generasi muda sebagai pedoman dalam menghadapi tantangan global dan moral bangsa Indonesia.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran strategis sebagai sarana internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam membentuk karakter peserta didik. PKn tidak hanya berfungsi sebagai mata pelajaran kognitif yang mengajarkan konsep kewarganegaraan, tetapi juga sebagai media pembentukan karakter moral, sosial, dan kebangsaan yang berlandaskan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial.

Proses internalisasi nilai Pancasila melalui PKn bersifat multidimensional, melibatkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta memerlukan keterlibatan aktif guru, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Strategi pembelajaran yang bersifat partisipatif, reflektif, kontekstual, dan berbasis keteladanan terbukti efektif dalam menanamkan nilai-nilai tersebut, termasuk melalui proyek sosial, studi kasus, musyawarah kelas, dan kegiatan berbasis pengalaman nyata.

Integrasi nilai-nilai agama dan budaya lokal juga memperkuat internalisasi, sehingga peserta didik tidak hanya memahami Pancasila secara teoritis, tetapi juga mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, PKn mampu membentuk generasi muda yang berkarakter Pancasila: cerdas, beriman, bermoral, memiliki kesadaran sosial, dan bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara.

Secara keseluruhan, Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi sebagai instrumen utama untuk membangun identitas nasional dan karakter bangsa di era globalisasi, menghadirkan warga negara yang tidak hanya patuh hukum, tetapi juga religius, humanis, demokratis, dan memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprianto, D. (2025). Digital citizenship and Pancasila values in 21st century learning. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 12(1), 45–58.
- Atmaja, S. (2024). Integrasi kearifan lokal dalam pembelajaran PKn berbasis nilai Pancasila. *Jurnal Moral dan Kewarganegaraan*, 6(2), 90–105.
- Basamah, F., & Ediyono, S. (2024). Transformasi nilai Pancasila melalui pembelajaran PKn reflektif. *Jurnal Pancasila dan Pendidikan Karakter*, 9(1), 33–47.
- Basamah, M., & Ediyono, S. (2023). Revitalisasi nilai Pancasila dalam pembelajaran PKn untuk penguatan identitas nasional. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(1), 23–33.
- Budimansyah, D. (2010). *Penguatan pendidikan kewarganegaraan untuk membangun karakter bangsa*. Widya Aksara Press.
- Hidayanto, A. (2025). Pembiasaan nilai Pancasila pada pendidikan anak usia dini. *Jurnal Pendidikan Moral Anak*, 4(1), 21–35.
- Hidayat, A. (2021). Penguatan pendidikan karakter melalui pembelajaran PPKn di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia*, 6(1), 55–64.
- Karimullah, A., & Sarim, S. (2025). Pendidikan kewarganegaraan dan pencegahan radikalisme melalui internalisasi nilai Pancasila. *Jurnal Integritas Bangsa*, 8(2), 112–128.
- Kemendikbud. (2013). *Kurikulum 2013: Kompetensi dasar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Lickona, T. (1991). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. Bantam Books.
- Lutfi, H. (2024). Peran pendidikan kewarganegaraan dalam pembentukan moral dan etika siswa di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Civic Education*, 5(1), 14–25.
- Malaka, A., Sanusi, M., Ruslan, & Maimun. (2024). Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum PKn di sekolah menengah. *Jurnal Kajian Pendidikan Karakter*, 12(2), 78–90.
- Malaka, M., Sanusi, A., & Ruslan, H. (2020). Problematika internalisasi nilai Pancasila dalam pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Ilmu Pendidikan Nasional*, 7(2), 87–102.

- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nasoha, A. M. M. (2020). Pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana internalisasi nilai-nilai Pancasila. *Jurnal Pendidikan dan Nilai Bangsa*, 8(2), 145–158.
- Nasoha, A. M. M. (2025). Integrasi prinsip etika Islam dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 10(1), 33–45.
- Nasoha, A. M. M. (2025). Peran nilai agama dalam pembentukan karakter kebangsaan berbasis Pancasila. *Jurnal Pendidikan Islam dan Kewarganegaraan*, 10(2), 78–94.
- Nasoha, A. M. M., & Atqiya, S. (2024). Pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana internalisasi nilai-nilai Pancasila. *Jurnal Pancasila dan Kebangsaan*, 5(1), 55–69.
- Pangalila, S. (2017). Pendidikan kewarganegaraan sebagai upaya nation and character building. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(2), 45–56.
- Samani, M., & Hariyanto, M. (2017). *Pendidikan karakter: Konsep dan model*. Remaja Rosdakarya.
- Sapriya. (2017). *Pendidikan kewarganegaraan (PKn): Konsep dan pembelajaran*. PT Remaja Rosdakarya.
- Setiadi, E. M., & Kolip, U. (2013). *Pengantar sosiologi: Pemahaman fakta dan gejala permasalahan sosial*. Kencana.
- Somantri, N. (2001). *Menggagas pembaharuan pendidikan IPS dan PKn*. Remaja Rosdakarya.
- Somantri, N. C. (2011). *Menggagas pembaharuan pendidikan IPS dan PKn*. Remaja Rosdakarya.
- Suprayogi, S., Rahmawati, D., Rafi'uddin, & Wiratomo, H. (2024). [Judul artikel tidak lengkap – mohon dilengkapi agar bisa diformat sesuai APA].
- Trisiana, A. (2020). Model pendidikan kewarganegaraan dalam penguatan karakter bangsa di era globalisasi. *Jurnal Civic-Culture*, 14(1), 11–20.
- Wibowo, A. (2019). *Pendidikan karakter berbasis Pancasila*. Pustaka Pelajar.
- Winataputra, U. S., & Budimansyah, D. (2012). *Civic education: Konteks, landasan, bahan ajar, dan kultur kelas*. Widya Aksara Press.